

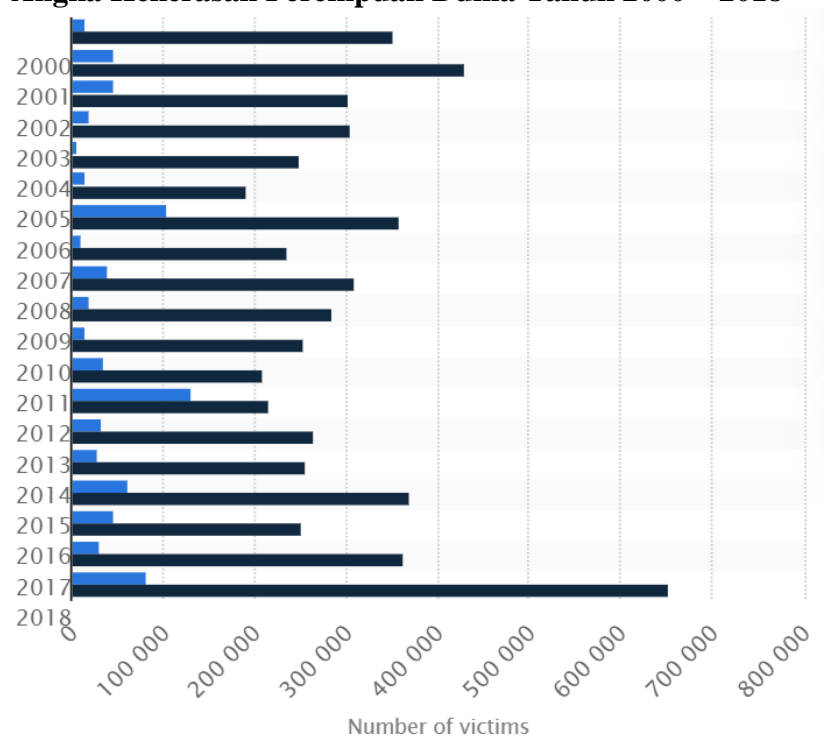
BAB II

Gerakan Gulabi Gang dan Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di India

2.1 Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di India

Jenis kelamin dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki – laki dan perempuan yang dapat dilihat dari tingkah laku dan sifat manusia. Namun beberapa menanggapi perbedaan tersebut sebagai sebuah masalah. Pemahaman gender yang berbeda akan mendorong seseorang untuk melakukan pelecehan dan kekerasan. Secara umum, pelecehan dipahami masyarakat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh laki – laki dengan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual sesuai dengan keinginan atau fantasi seksual yang dimiliki, termasuk melakukan hubungan secara paksa. (Smith, 2004) Praktik diskriminasi gender seperti pelecehan dan pemerkosaan termasuk dalam pelanggaran HAM karena didalamnya terdapat tindak pengancaman, pemaksaan dan perampasan hak orang lain. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan atau secara tidak langsung mengakibatkan bahaya dan penderitaan fisik, seksual dan psikologi kepada perempuan termasuk tindakan ancaman, paksaan, merampas kemerdekaan seseorang baik dilakukan dalam ranah publik maupun privat” (General Assembly Resolution 48/104) Pada tahun 2018, secara general terdapat 652.676 perempuan yang diperkosa, data tersebut belum termasuk serangan seksual non-pemerkosaan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Vuleta, 2020).

Gambar 2.1
Angka Kekerasan Perempuan Dunia Tahun 2000 – 2018



Sumber : Statistic Research Department, 7 November 2019

Gambar tersebut menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat. Angka tersebut akan terus meningkat tiap tahun sebesar 2,9% dan belum menunjukkan adanya penurunan angka. Pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan dari tahun – tahun sebelumnya. Angka kekerasan perempuan dari tahun 2000 – 2018 mengalami dinamika baik naik dan turun. Saat ini, kekerasan bukan hanya berasal dari fisik namun mulai merambah pada dunia maya, seperti pelecehan berbasis video dan chatting, penayangan video asusila, aksi *bullying*, dll. Dengan ini kekerasan perempuan menjadi isu yang cukup memprihatinkan di beberapa negara.

Kondisi diskriminatif bagi perempuan banyak terjadi dalam situasi pasca kolonisasi, negara – negara miskin di Selatan dan negara – negara dalam masa transisi era globalisasi. Data *The Globalist* menunjukkan bahwa India saat ini menjadi negara berkembang yang menghadapi dua realitas yang berbeda. Dimana terjadi perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat namun disatu sisi mengalami banyak kasus pelecehan perempuan hingga menyebabkan kematian perempuan (Chelala, 2020). Perempuan merupakan agen pembangunan berkelanjutan yang utama untuk mencapai sebuah perubahan dalam bidang ekonomis, sosial dan lingkungan sebuah negara. Akan tetapi keterbatasan akses perempuan di India menghambat pembangunan negara. Perempuan dibatasi aksesnya dalam layanan

kesehatan, pendidikan dan politik serta di perparah dengan krisis global seperti krisis pangan, krisis air bersih, krisis ekonomi dan perubahan iklim. Sebagai contoh bahwa petani perempuan India (khususnya yang berada di pedesaan) tidak mendapatkan akses ke sumber benih, kredit tani, maupun penyuluhan program tani, serta jumlah perempuan pemilik tanah pertanian kurang dari 20% (BBC, 2016).

India menjadi negara dengan tingkat pemerkosaan yang tinggi di dunia. Menurut data dari National Crime Records Bureau (NCRB), terjadi peningkatan kasus pemerkosaan sebesar 9,2 persen dari tahun 2007 hingga 2011 (Radha R Sharma, 2014). Bahkan dari tahun 2011 – 2016 Ibu Kota Delhi mengalami peningkatan angka pemerkosaan sebesar 277% dari 572 kasus menjadi 2.155 kasus (Mallapur, 2017). Tingginya angka pemerkosaan ini membuat India menempati posisi ketiga dunia untuk kasus pemerkosaan setelah Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dalam representasi regional, wilayah India Utara seperti Uttarakhand, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab menjadi wilayah dengan kasus pemerkosaan tertinggi. Hingga tahun 2016, terdapat sekitar 50 kasus pemerkosaan setiap harinya. Peningkatan angka yang tajam selama 40 tahun terakhir menyebabkan kekhawatiran. Diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung akan membawa kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan dalam masyarakat. Korban akan mengalami kerugian baik secara psikologis maupun sosial. Di India diperkirakan ada sekitar 87.000 perempuan yang sengaja dibunuh saat menjadi korban pemerkosaan pada tahun 2011 - 2017. Sekitar 50.000 (58%) perempuan dibunuh oleh anggota keluarga mereka sendiri dan 30.000 (42%) dibunuh oleh pasangan intim (pelaku pemerkosaan) (UN Women, 2019). Pelaku biasanya ingin menghilangkan jejak pemerkosaan supaya tidak ada satu orangpun yang tahu dan melaporkannya ke kepolisian. Alasan keamanan inilah yang menyebabkan banyak perempuan korban pemerkosaan sengaja dibunuh oleh pelaku kejahatan.

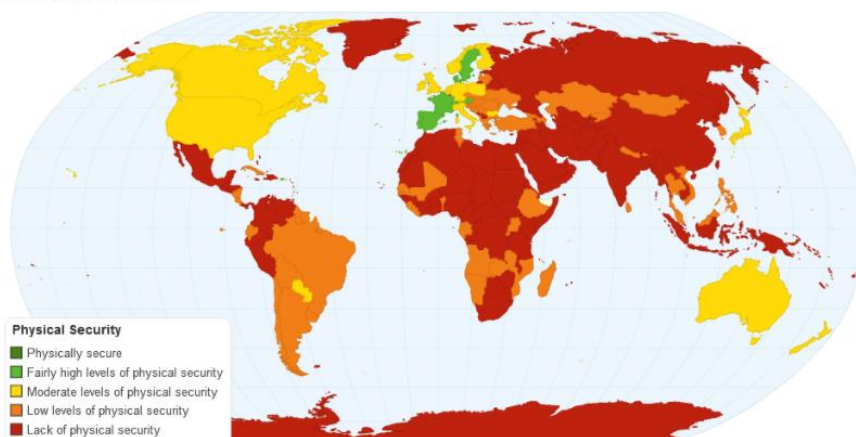
2.1.1 Tingkat Keamanan Perempuan India

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu kasus yang sampai saat ini masih banyak ditemukan di beberapa negara. Diskriminasi gender kepada kaum perempuan akan merugikan kaum perempuan. Keamanan individu menjadi tujuan yang penting untuk diperjuangkan khususnya dalam perkembangan diskriminasi gender.

Gambar 2.2

Peta Persebaran Keamanan Fisik Perempuan Dunia

Physical Security of Women



Source : Physical Security of Women, The Woman Stats Project, 2016

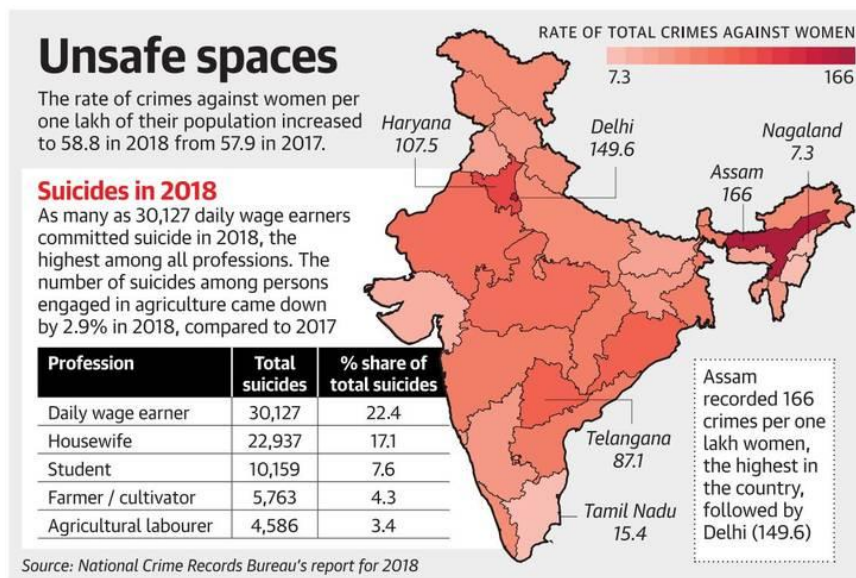
Gambar tersebut menunjukkan peta tingkat keamanan fisik wanita secara global. Keamanan fisik diartikan sebagai keadaan yang menolak segala akses tidak sah untuk melindungi diri dan individu dari bahaya dan kerusakan. Dalam data diatas, keamanan fisik dibagi menjadi lima kategori : aman secara fisik, tingkat keamanan yang cukup tinggi, tingkat keamanan yang sedang, tingkat keamanan rendah dan kekurangan keamanan fisik. Sebagian besar negara Eropa memiliki keamanan fisik yang tinggi seperti Swedia, Prancis, Spanyol dan Portugal digolongkan sebagai negara yang menjamin keamanan secara fisik. Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang juga digolongkan negara dengan tingkat keamanan fisik yang cukup tinggi. Negara – negara di Amerika Latin seperti Brazil, Chili dan Argentina memiliki keamanan fisik yang rendah. Sedangkan sebagian besar negara Asia seperti China, Rusia dan India serta benua Afrika memiliki keamanan fisik yang kurang bahkan mengalami ketidakcukupan. Dengan ini keamanan perempuan di India termasuk dalam kategori kurang bahkan memprihatinkan.

India menjadi negara dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan bertambah dengan cepat setiap tahunnya. Berdasarkan catatan dari National Crime Records Bureau (NCRB) India mengalami peningkatan jumlah kekerasan perempuan sebesar 873,3 persen di India dari 1971 hingga 2012 (The Times of India News, 2012). Kasus kekerasan terhadap perempuan India selalu menjadi sorotan publik baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Bukan hanya terjadi di satu atau dua negara bagian India, namun hampir seluruh wilayah di India terjadi kasus kekerasan perempuan India.

Di tahun 2018, NCRB mencatat bahwa kejahatan pemerkosaan di India dicatatkan terjadi setiap 15 menit dan terjadi peningkatan kasus menjadi 58,8 %. Persebaran angka kekerasan terhadap perempuan dipaparkan sebagai berikut

Gambar 2.3

Peta Persebaran Keamanan Perempuan India



Sumber : NCRB India, 2018

Dalam tabel tersebut terlihat hampir seluruh wilayah India mengalami tindakan kekerasan terhadap perempuan. Assam menjadi wilayah dengan angka paling tinggi sekitar 166 kasus, New Delhi dengan 149 kasus dan Haryana dengan 107 kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thompson-Reuters Foundation, India menempati peringkat ke – 4 sebagai negara paling berbahaya bagi wanita bersama dengan Afganistan, Kongo, Pakistan dan Somalia. Survei tersebut meranking negara – negara berdasarkan enam kategori yaitu ancaman kesehatan mental maupun fisik, kekerasan seksual (pemukosaan), kekerasan non – seksual, praktek – praktek budaya yang berbahaya, tradisi atau agama, keterbatasan akses dalam ekonomi dan perdagangan manusia. Kasus kekerasan terhadap perempuan memberikan reputasi buruk bagi India sebagai negara dengan tingkat keamanan perempuan yang rendah.

2.1.2 Bentuk Diskriminasi Perempuan di India

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk perilaku seksual yang menyimpang di masyarakat. Di India, kekerasan terhadap perempuan dibagi beberapa kategori sebagai berikut : pemerkosaan, pelecehan seksual di tempat kerja, prostitusi paksa, aborsi bayi perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan di India terus bertambah setiap tahunnya. Berikut tabel variasi kasus kekerasan terhadap perempuan India tahun 2011 – 2015 :

Gambar 2.4
Perkembangan Kasus Kekerasan Perempuan India
Tahun 2011 - 2015

Crime Head-wise Cases Registered under Crime against Women during 2011 - 2015 and Percentage Variation in 2015 over 2014

| Sl. No | Crime head | Year | | | | | Percentage variation in 2015 over 2014 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | Rape# | 24,206 | 24,923 | 33,707 | 36,735 | 34,651 | -5.7 |
| 2 | Attempt to Commit Rape* | - | - | - | 4,232 | 4,434 | 4.8 |
| 3 | Kidnapping & Abduction of Women | 35,565 | 38,262 | 51,881 | 57,311 | 59,277 | 3.4 |
| 4 | Dowry Deaths | 8,618 | 8,233 | 8,083 | 8,455 | 7,634 | -9.7 |
| 5 | Assault on Women with Intent to Outrage her/his Modesty | 42,968 | 45,351 | 70,739 | 82,235 | 82,422 | 0.2 |
| 6 | Insult to the Modesty of Women | 8,570 | 9,173 | 12,589 | 9,735 | 8,685 | -10.8 |
| 7 | Cruelty by Husband or His Relatives | 99,135 | 1,06,527 | 1,18,866 | 1,22,877 | 1,13,403 | -7.7 |
| 8 | Importation of Girl from Foreign Country | 80 | 59 | 31 | 13 | 6 | -53.8 |
| 9 | Abetment of Suicide of Women | - | - | - | 3,734 | 4,060 | 8.7 |
| A. | Total IPC Crime against Women | 2,19,142 | 2,32,528 | 2,95,896 | 3,25,327 | 3,14,575 | -3.3 |
| 10 | Commission of Sati Prevention Act | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Indecent Representation of Women (P) Act | 453 | 141 | 362 | 47 | 40 | -14.9 |
| 12 | The Dowry Prohibition Act | 6,619 | 9,038 | 10,709 | 10,050 | 9,894 | -1.5 |
| 13 | Protection of Women from Domestic Violence Act | - | - | - | 426 | 461 | 8.2 |
| 14 | Immoral Traffic (Prevention) Act | 2,436 | 2,563 | 2,579 | 2,070# | 2,424 | 17.1 |
| B. | Total SLL Crime against Women | 9,508 | 11,742 | 13,650 | 12,593 | 12,819 | 1.8 |
| | Total(A+B) | 2,28,650 | 2,44,270 | 3,09,546 | 3,37,922 | 3,27,394 | -3.1 |

Source : NCRB India, 2015

Dalam tabel merupakan perkembangan kasus kejahatan terhadap perempuan India dari tahun 2011 – 2015. Kejahatan yang terjadi di India dikategorikan dalam 'Indian Penal Code (IPC)' dan 'Special and Local Laws (SLL)'. Kasus kejahatan terhadap perempuan yang termasuk kedalam ranah IPC terdiri dari: pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, penculikan perempuan, kematian, pelecehan, penghinaan, kekerasan oleh suami atau kerabat, impor wanita dari luar negeri dan mendukung perempuan untuk bunuh diri. Sedangkan kasus kejahatan yang termasuk dalam ranah SLL terdiri dari : pelanggaran mahar, melakukan tindakan 'sati' (tindakan seorang janda melemparkan dirinya ke tumpukan pemakaman suaminya), kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan perempuan. Pada tahun 2015 jumlah kejahatan dalam kategori IPC dan SLL sekitar 3,270,394 kasus kejahatan.

Kekerasan perempuan di India tidak terlepas dari nilai – nilai konservatif yang berlaku dalam tradisi dan budaya mereka. Sayangnya, nilai – nilai konservatif yang dipercaya masyarakat India sebagian besar tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Nilai tersebut terus berlangsung hingga saat ini dalam aktivitas domestik, ekonomi, politik dan budaya. Secara konseptual dan historis nilai konservatif tidak hanya mengandung perbedaan *power* antara laki – laki dan perempuan namun juga terkait dengan dampak negatif *shared identity*, solidaritas kelompok, *common bonds* dan kewajiban bersama. Budaya dan tradisi di India yang menganut nilai – nilai konservatif meliputi Tradisi *Dowry* (mahar), *Female Foeticide*, Genitoplasty, Tradisi Sati, Tradisi Gaokors, Budaya Kasta Dalit. Selain itu, nilai – nilai ini pada akhirnya diadopsi oleh sebagian orang dan dipahami dengan pemahaman yang salah. Terdapat nilai – nilai fundamentalis di India terkait sistem patriarki dimana menekankan *manpower*, laki – laki lebih berharga daripada perempuan. Oleh karena pemahaman ini, banyak terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh laki – laki kepada perempuan karena kekuasaan yang mereka miliki. Kasus – kasus ini menjadi perhatian nasional dan internasional karena kejamnya pelaku pemerkosaan.

2.1.2.1 Kasus Dowry Deaths (Mahar)

Dowry merupakan tradisi pemberian mahar yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki – laki. Semakin tinggi derajat dan status sosial laki – laki akan semakin tinggi jumlah permintaan barang atau uang. Permintaan mahar ini tidak memiliki ketentuan yang pasti, seringkali permintaan keluarga pengantin laki – laki berhenti diawal pernikahan namun terkadang berlanjut hingga setelah menikah dan mempunyai anak. Permintaan mahar terus dilakukan oleh pihak laki – laki jika ingin anak – anak mereka menerima perlakuan yang baik dari keluarga laki – laki. Tradisi *Dowry* sangat merugikan pihak perempuan karena perempuan dianggap akan menjadi beban keluarga secara finansial di kemudian hari. Permintaan mahar yang besar terkadang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga perempuan, sehingga mereka harus menerima ancaman, penganiayaan fisik dan mental hingga pembunuhan karena mahar disebut *dowry murder* atau *dowry deaths*.

Dowry Deaths merupakan pembunuhan pengantin wanita atau pemaksaan untuk bunuh diri bagi wanita yang tidak dapat memenuhi permintaan mahar atau mas kawin. Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional

India, Dalam satu contoh, perempuan India menghabiskan Rs 15 lakh dan Rs 1,3 lakh untuk mas kawin. Setelah pernikahan, mempelai wanita diminta untuk melunasi pinjaman rumah mempelai pria dan disiksa untuk mendapatkan uang tambahan. Pihak perempuan menolak, akhirnya dia didorong dan dibakar oleh sang suami. Kasus ini berakhir di Kepolisian Kota Bangaluru dan diproses secara hukum. Kasus lainnya dialami seorang perempuan yang telah menikah selama 7 tahun dan dibiarkan mati kelaparan selama kurang lebih 2 tahun oleh suami dan mertuanya. Tindakan ini dilakukan karena keluarga laki – laki meminta emas 1 kg dan rumah kepada sang istri. Sebuah kejahatan harus ‘dibuktikan’ atau ‘ diperlihatkan’ saat dipersidangan. Namun faktanya, berkali – kali pembunuhan dan pelecehan dalam *dowry deaths* tidak dapat dibuktikan bahkan disembunyikan sebagai kecelakaan, sehingga pelaku dapat dengan mudah melarikan diri. Bentuk kekerasan lainnya dinamakan *bride burning*, menyiramkan minyak tanah ke tubuh sang istri dan menyulutnya dengan api hingga terbakar dan tewas. Hal ini dilakukan untuk melenyapkan bukti penganiayaan fisik yang dilakukan suami, mertua atau saudara iparnya kepada perempuan.

Tingginya permintaan mahar (*dowry*) akan merugikan pihak perempuan. Alasan inilah yang melatarbelakangi tindakan *Genitoplasty* atau pergantian jenis kelamin. Pergantian jenis kelamin ini dilakukan terhadap anak perempuan yang berumur di bawah 14 tahun. Tindakan ini dilakukan agar mereka tidak terlibat dalam praktik *dowry* yang membutuhkan biaya yang besar serta mewajibkan keluarga untuk terus memberi mahar setiap ada perayaan. Hampir ratusan perempuan dalam setahun dari Mumbai dan Delhi melakukan operasi ganti kelamin di Indore. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kelamin putri mereka relatif murah sekitar 2.000 pundsterling atau Rp 27,6 juta (Kadam, 2011).

2.1.2.2 Kasus Female Foeticide dan Female Infanticide

Female Foeticide atau aborsi selektif jenis kelamin menjadi salah satu fenomena yang ditemui di India dan sudah dilakukan sejak lama. Pusat aborsi di Mumbai menyatakan telah melakukan tes penentuan jenis kelamin sebelum melakukan aborsi. Sekitar 8.000 janin yang diaborsi di enam rumah sakit, semuanya berjenis kelamin perempuan. Survei yang sama menyatakan ada

sekitar 4.000 bayi perempuan diaborsi di wilayah Tamil Nadu (India Selatan) (Gangrade, 1988). Sedangkan *Female Infanticide* atau pembunuhan bayi perempuan merupakan tindakan disengaja untuk membunuh bayi perempuan dalam waktu satu tahun setelah kelahirannya. Pembunuhan bayi dilakukan dengan menggunakan bahan kimia organik dan non – organik atau dengan sengaja memberikan makan bayi yang sudah diberi racun oleh anggota keluarga, tetangga atau bidan. Dampak dari praktik ini yaitu menurunnya jumlah perempuan di beberapa wilayah seperti Baghpat, Haryana, Punjab, Rajashtan dan Gujarat. Jumlah kelahiran perempuan yang semakin menurun akan memperpuruk kondisi perempuan India ditengah diskriminasi gender. Pada tahun 2011 di wilayah Baghpat hanya terdapat 858 perempuan yang tersisa. Rasio kelahiran akan terganggu dan merugikan sebagian besar perempuan karena praktik – praktik yang tidak manusiawi.

2.1.2.3 Kasus ‘Geng Rape’ (Kasus Imrana, Nirbhaya, dan Shakti Mills)

India memang tidak lepas dari tingginya kasus pemerkosaan. Selama 40 tahun terakhir, insiden pemerkosaan tidak terhitung jumlahnya dan terus menempati sebagian besar berita harian India. Dari banyak kasus pelecehan seksual di India, penulis mengambil tiga kasus yaitu kasus Imrana, Nirbhaya dan Shakti Mills. Ketiga kasus ini menarik media internasional dan memicu banyak gerakan protes dari masyarakat India.

Pertama, kasus pemerkosaan Imrana tahun 2005. Kasus ini terjadi di distrik Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India (sekitar 70 km dari Delhi). Imrana, pada saat itu berusia 28 tahun, mengalami penyerangan seksual oleh ayah mertuanya. Suaminya bekerja di luar kota, sedangkan dia bersama kelima anaknya tinggal bersama mertuanya. Ayah mertuanya, Ali Muhammad dan teman - temannya, sering memperkosa dirinya sambil mengancam akan membunuh dia dan anak – anaknya jika menolak ajakan tersebut. Imrana kemudian melaporkan kasus tersebut ke badan pemerintahan setempat, Panchayat. Pelaku pemerkosaan tidak dapat diproses hukum karena mereka menyatakan pernikahan dengan suaminya, Noor Elahi, termasuk pernikahan ilegal dan menurut ketentuan Imrana harus menikahi pemerkosanya. Putusan yang sama juga disampaikan Darul Uloom Deoband, Seminari Islam di India dan Samajwadi Mulayam Singh, Ketua BJP yang memaksa Imrana untuk

mejalani tes medis untuk membuktikan bahwa pemerkosaan “tidak terjadi.” Imrana akhirnya menyerahkan kasus kepada komnas perempuan untuk menentang keputusan Panchayat yang didominasi oleh laki – laki. Dia memohon keringanan hukuman dengan mengatakan “jika perempuan tidak aman di rumah perkawinan mereka, maka dia juga tidak merasa aman dimanapun.” (Akbar, 2014). Pelaku akhirnya diadili di pengadilan yang lebih rendah di Muzaffarnagar dengan dihukum 10 tahun penjara namun dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2010. Tragedi ini menjadi kontroversi nasional dan internasional ketika aparat hukum setempat dan pemerintah merendahkan martabat perempuan dengan tidak memproses pelaku kejahatan sesuai hukum.

Kasus pemerkosaan kedua terjadi didalam bus atau dikenal sebagai kasus ‘Nibhaya’. Nirbhaya merupakan wanita yang berasal dari wilayah Uttar Pradesh India dan sedang menikmati studinya di New Delhi. Pada tanggal 16 Desember 2012, dia bersama dengan temannya, Awindra Pandey, ingin menonton teater *Life of Pi* di Delhi Selatan. Karena letaknya yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk menaiki bus namun bus tersebut tidak melaju di rute yang seharusnya. Ditengah pertengkaran itu, lima pria yang menyamar menjadi penumpang membuat Nirbhaya pingsan dan secara bergiliran memperkosa, menggigit dan menyodominya dengan pipa besi. Bahkan pengemudi bus saat itu juga mengambil bagian dalam giliran ini. Salah satu pelaku merusak kemaluan, rahim dan ususnya menggunakan besi berkarat yang memperparah lukanya. Awindra, teman Nirbhaya, terlebih dulu dipukul dan diserang secara brutal. Setelah hampir 2 jam melakukan aksinya di dalam bus, pelaku melempar keluar bus kedua korban yang telanjang dan berlumuran darah. Mereka bahkan berusaha untuk menabrak keduanya dengan bus itu. Awindra dinyatakan selamat, sedangkan Nirbhaya meninggal setelah dua minggu dirawat di Rumah Sakit Singapura. Masyarakat India menafsirkan pelanggaran dan kematian ini pada tingkat pribadi, sedangkan hukum melarang rilis publik nama korban dan pelaku pemerkosaan seperti ‘Nibhaya’ yang sebenarnya bernama asli Jyoti Singh (BBC, 2020). Kasus ini menjadi perhatian Internasional karena serangannya yang kejam serta kurangnya perlindungan yang ditawarkan polisi dan negara sehingga memicu kemarahan perempuan. Perempuan mengungkapkan tuntutan dan keprihatinan terhadap hukum dan dampak jangka panjang kasus kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, negara menanggapi

aksi perempuan dengan melempar gas air mata, menutup layanan bus, mengalihkan lalu lintas, membatasi siaran TV nasional dan menangkap perempuan yang berkemah di lokasi protes. Dalam hal ini, perempuan mendapatkan masalah lain selain terkait tuntutan keadilan yaitu kebebasan untuk berpendapat.

Kasus ketiga terjadi di wilayah Shakti Mills di Mumbai Selatan. Kasus pemerkosaan massal Shakti Mills merujuk pada insiden jurnalis di Mumbai yang diperkosa oleh lima orang remaja. Gadis berusia 22 tahun tersebut ingin menuliskan artikel mengenai simbol kebanggaan di Mumbai dan mengambil beberapa gambar disana. Pada 22 Agustus 2013, dia mengunjungi wilayah Shakti Mills bersama satu kolega laki – lakinya di wilayah Shakti Mills yang sepi. Setelah itu, tiga orang yang menyamar menjadi polisi menegur mereka karena mengambil foto tanpa izin. Terjadi perselisihan dengan mulai menyerang kolega laki – laki dan dua lainnya mengikat kolega tersebut dengan sabuk. Lima pelaku tersebut memperkosa gadis tersebut sebanyak 6 kali sambil meletakkan pecahan botol bir di lehernya. Mereka juga mendokumentasikan korban selama pelecehan seksual berlangsung dan mengancam akan menyebarkan di media sosial jika korban mengadu. Faktanya, ‘Geng Rape’ di wilayah Shakti Mills sudah mentarget setidaknya 10 perempuan selama enam bulan (Ali, 2013). Modusnya hampir sama yaitu menyamar menjadi petugas polisi, membawa korban ke gedung bekas pabrik serta mengancam korban dengan foto. Dalam kasus ini, Polisi Mumbai meminta korban untuk menjalani ‘tes dua jari’ yaitu pemeriksaan selaput dara sebagai bukti aktivitas seksual. Namun prosedur ini dianggap tidak relevan secara medis, merendahkan kaum perempuan dan hasilnya tidak akurat. Polisi justru bersikap kasar kepada korban dan tidak bersimpati kepada korban.

2.1.3 Tanggapan Pemerintah India

Pembahasan tentang hak asasi perempuan dan perjuangan nasib perempuan menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk negara. Negara perlu menjamin keamanan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Hak asasi perempuan diatur dalam sistem hukum meliputi instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan hukum baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional. Dalam konteks India, negara berusaha memberikan kesetaraan kepada perempuan dan

menetralkan angka kumulatif diskriminasi gender. Prinsip kesetaraan gender tercantum dalam pembukaan Konstitusi India, *Fundamental Rights, Fundamental Duties* dan asas – asas pedoman (NLRD, 2012). Konstitusi India mendorong negara untuk mengambil langkah – langkah positif atas hak – hak dasar perempuan seperti menjamin kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama, melarang diskriminasi agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir bagi seluruh warga negara serta menjamin kesempatan yang setara bagi semua warga negara. Sebagai negara demokrasi, pemerintah menetapkan hukum, kebijakan pembangunan dan rencana program yang mendorong kemajuan perempuan di berbagai bidang.

Dalam ranah internasional, India telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan instrumen HAM yang berfokus pada keamanan perempuan. Sejak Juli 1993, India telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993. CEDAW merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di negara – negara yang telah meratifikasi perjanjian ini. Dalam perjanjian ini negara pihak harus mengambil ‘tindakan yang tepat’ dalam memperbaiki dan menghapuskan praktek diskriminasi perempuan seperti perdagangan manusia, eksploitasi dan prostitusi. Negara juga perlu memberikan akses yang samam dalam pendidikan, kesehatan dan kebebasan memilih (Napikoski, 2019). Salah satunya pemerintah India menetapkan kebijakan terkait kekerasan perempuan dalam Undang – Undang Hukum Pidana (Amandemen) 2013 dan KUHP India (Indian Penal Code-IPC) bagian 354A. Dengan bergabungnya India dalam ratifikasi CEDAW, Pemerintah India turut aktif mengupayakan perjuangan hak – hak perempuan dan melaporkan secara berkala kepada komisi CEDAW.

Akan tetapi penerapan ratifikasi CEDAW di India tidak menghasilkan dampak positif. Faktanya, kasus pelecehan perempuan yang telah disajikan dalam tulisan ini mengalami peningkatan secara drastis sejak meratifikasi CEDAW. Dalam beberapa catatan menunjukkan bahwa India hanya ‘berusaha’ melindungi perempuan, namun tidak diimplementasikan dalam hukum domestik. Salah satu alasan mengapa sulit untuk menegakkan peraturan CEDAW karena berenturan dengan agama, budaya dan tradisi India yang mendukung dominasi salah satu gender. Perjanjian CEDAW dianggap memiliki cakupan yang terlalu luas dan menimbulkan keambiguitasan bagi negara peserta. (Schane, 2002) Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah india dengan tidak melakukan kewajibannya melalui beberapa peraturan perundangan seperti tidak menjamin persamaan hak antara laki – laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga

yang tercantum pada pasal 5 (a) dan pasal 16 (1) deklarasi CEDAW. Pada pasal 16(1) Pemerintah India menyatakan prinsip pendaftaran pernikahan (penetapan usia legal) tidak praktis di negara yang luas dengan beragam adat istiadat, agama dan kelas seperti di India (United Nations, 2013). Permasalahan pernikahan, perceraian, pembagian hak waris dan pengadopsian di India dianggap sebagai hal pribadi dan lebih diselesaikan melalui tokoh – tokoh adat menggunakan *Hindu Succession Amendment Act* (2005). Hal ini menunjukkan keengganan pemerintah India untuk mengubah budaya tradisional yang terkadang mendukung superioritas salah satu gender di masyarakat. Melalui pernyataan ini India dianggap melanggar pasal 5(a) dimana terdapat superioritas atau inferioritas gender dan pasal 16 (1) dimana tidak adanya jaminan kesetaraan gender di lingkup rumah tangga.

2.2 Gerakan Vigilantism Gulabi Gang

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan pembentukan Gulabi Gang dimulai dari sejarah pembentukan, contoh – contoh aksi kolektif dan strategi Gulabi Gang sebagai gerakan vigilantism perempuan di India.

2.2.1 Sejarah Pembentukan Gulabi Gang

Gulabi Gang merupakan gerakan wanita di India yang resmi terbentuk pada tahun 2006. Sampat Pal Devi bersama dengan kelima temannya mendirikan gerakan ini di Bundelkhand, Uttar Pradesh. Wilayah ini merupakan salah satu distrik di India yang menderita karena mengalami kekeringan parah selama bertahun – tahun. Hingga saat ini terdapat sekitar 20.000 anggota Gulabi Gang yang tersebar di beberapa wilayah di India. Wanita yang menjadi anggota Gulabi Gang memiliki beberapa kesamaan, salah satunya adalah kesamaan kasta mereka. Anggota dari Gulabi Gang sebagian besar merupakan wanita berkasta rendah yang mengalami kekerasan baik seksual maupun fisik. Sekitar 600 desa di Banda, Uttar Pradesh mengalami jumlah kekerasan dalit terbesar di India. Lebih dari 1,6 juta orang di Banda atau lebih dari 20% anggota merupakan kasta terendah atau dalit. (Sen, 2012) Dalit merupakan sistem kasta di India yang biasanya tidak pernah disentuh (*untouchable*), orang – orang yang tidak memiliki warna. Saat ini sistem kasta tersebut meluas ke beberapa daerah pedesaan di India. Oleh karena itu, ada rasa saling ketergantungan yang kuat antar masyarakat desa yang memiliki kesamaan kasta. Ketidakadilan tentang kasta ini sudah dirasakan masyarakat sejak lama dan sulit untuk ditinggalkan.

Gambar 2.5
Gulabi Gang India



Sumber : gulabigang.in, 2006

Gulabi Gang ini secara harfiah berarti *The Pink Gang* (kelompok merah muda) di India. Asal usul nama ini muncul karena dalam menjalankan aksinya, para wanita ini mengenakan sari berwarna merah muda menyala serta memegang tongkat merah muda di tangan mereka. Merah muda menjadi tanda dan simbol perjuangan wanita India. Dengan warna merah muda tersebut mereka ingin menunjukkan kepada orang lain keberadaan kelompok mereka. Kesamaan nasib dan keadaan membuat mereka menyatukan kekuatan serta menunjukkan keberanian melawan ketidakadilan khususnya terkait gender. Dengan adanya persatuan yang kuat antar anggota kelompok maka mereka disebut sebagai “geng”.

“Kami bukan geng seperti pengertian dari istilah itu. Kami adalah geng untuk keadilan. Kata Geng belum tentu menunjukkan penjahat. Ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan crew.” (Sen, 2012)

Lanjutnya Devi mengatakan bahwa hal ini tidak berkonotasi negatif karena merupakan bentuk solidaritas antar sesama wanita yang memperjuangkan hak – hak mereka. Dengan kolektifitas ini, aktor di dalamnya tidak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka melainkan bertindak sesuai dengan kepentingan kolektif. (Ritzer, 2005) Gerakan wanita ini penting untuk memperjuangkan tujuan kolektif anggota Gulabi Gang. Mereka berjuang untuk meningkatkan harga diri perempuan pedesaan atas tindak kekerasan serta melawan tindak patriarki.

Kelompok ini menjadi pembicaraan masyarakat dan menarik perhatian karena cara mereka memperjuangkan keadilan. Sampat dan teman – temannya melemparkan bubuk cabai kepada pelaku kekerasan dan membawa tongkat ketika melakukan patroli. Selain itu, Sampat mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat sekitar dan membentuk jaringan dengan orang – orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak wanita. Dalam lima tahun, Sampat telah berhasil mengumpulkan 20.000 wanita untuk menjadi anggota Gulabi Gang. Beberapa anggota terdiri dari satu keluarga dimana terdapat ibu, saudara perempuan, anak, maupun nenek yang termasuk dalam kasta rendah yang ingin memperjuangkan wanita dan kelas. Geng ini memiliki pos – pos penjagaan di sekitar wilayah Bundelkhand, Uttar Pradesh yang berfungsi sebagai penampung laporan kekerasan dari masyarakat sekitar. Hampir setiap hari terdapat wanita yang datang ke markas Gulabi Gang serta menghadiri pertemuan rutin untuk melaporkan tindakan kekerasan atau sekedar meminta dukungan. Kebanyakan orang datang dari luar wilayah Uttar Pradesh karena tertarik dan melihat adanya peluang untuk mendapatkan keadilan. Setiap harinya, Sampat dan gerakan Gulabi Gang disebut dalam surta kabar lokal India. “Hampir seluruh artikel menampilkan gambar Sampat yang bersenjatakan tongkat, suaranya lantang ditengah – tengah protes dengan pasukan lautan perempuan berbaju pink”. (Fontenella-Khan, 2013) Terdapat dua alasan mengapa gerakan ini mendapatkan respon positif masyarakat, *pertama*, gerakan perempuan perlu mempertahankan simpati untuk mendapatkan legitimasi, *kedua*, masyarakat yang ikut bergabung turut berkontribusi dalam perbaikan kondisi kehidupan perempuan. Dengan visi misi Gulabi Gang, banyak masyarakat yang membicarakan keberhasilan gerakan dan merasa tertarik untuk bergabung. “Popularitas Gulabi Gang menunjukkan kapasitas perempuan, keseluruhan aksi menggarisbawahi visi kolektif jangka panjang dari perempuan pedesaan dalam wacana keadilan dan diharapkan tetap hidup dalam ingatan publik.” (Fontenella-Khan, 2013)

2.2.2 Aksi Kolektif Gulabi Gang

Konstruksi identitas menjadi hal yang fundamental dalam keberlangsungan sebuah gerakan dan akan menentukan kesuksesan sebuah gerakan dalam jangka waktu yang panjang. Aksi kolektif digunakan oleh mereka yang tidak memiliki akses secara langsung kepada konstitusi dan terkadang melibatkan kekerasan atau aksi radikal

sebagai upaya alternatif untuk melawan kekuatan negara dan orang – orang berpengaruh di negara (Tarrow S. , 1998). Gulabi Gang mengadopsi identitas gender dengan seluruh anggota berjenis kelamin perempuan dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kesetaraan gender di India. Perempuan yang tergabung sebagian besar berasal dari kasta ‘dalit’, masyarakat miskin dan terpinggirkan. Mereka menggunakan teknik protes yang terkenal di India yang disebut "gherao". Hal ini dapat terlihat dari kesaksian yang disampaikan oleh orang – orang yang terlibat dalam Gulabi Gang. Kasus pertama disampaikan langsung oleh anggota Gulabi Gang bernama Aarti Devi (22) dalam artikel Vice. Dia menyampaikan kesaksiannya sebagai anggota aktif Gulabi Gang.

“Saya merupakan perempuan berkasta dalit dan menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria berkasta tinggi. Ayah saya melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, namun ayah saya dan dua orang lainnya ditahan. Saya akhirnya meminta bantuan kepada Sampat Pal Devi dan menceritakan keluhan saya. Sampat bersama beberapa anggota lainnya menyerbu kantor polisi dan menuntut pembebasan ayah saya dan penduduk lainnya yang ditahan serta menuntut proses hukum terhadap kasus pemerkosaan. Kami memukuli seorang polisi yang sedang bertugas dengan lathis” – Aarti Devi (Das S. , 2008)

Dalam kesaksian tersebut, Aarti Devi merupakan korban dari kekerasan seksual dan penindasan kasta dalit. Gulabi Gang yang menerima keluhan dari korban langsung melakukan aksinya dengan mendatangi kantor kepolisian setempat. Sambil membawa lathis, mereka melakukan serangan kepada polisi yang sedang bertugas untuk menuntut pembebasan dan keadilan. Aksi dari Gulabi Gang bukan hanya menuntut keadilan bagi korban kekerasan melainkan juga memperjuangkan kesetaraan gender dan kasta secara lebih general. Mereka juga melakukan serangan kepada pihak yang terlibat dalam praktek ketidakadilan di masyarakat. Seperti contoh kasus yang disampaikan oleh anggota Gulabi Gang pada artikel Vice yang berjudul “*A Flux of Pink Indians*”.

“Di Attara, pemerintah menjalankan bisnis pasar fairprice yaitu membawa produk – produk terbaik dengan harga yang wajar. Namun terdapat keluhan bahwa pemerintah tidak membagikan biji – bijian dan makanan dengan layak. Kami berinisiatif melakukan penjagaan toko secara rahasia. Selanjutnya kami melakukan pencegatan truk dengan design “*Below Poverty Line*” yang sedang menuju ke pasar dan menyita gandum dan biji – bijian. Kami menyerahkan bukti ke kepolisian namun mereka menolak pengaduan kami. Hal itu membuat para anggota marah dan menyerang salah satu petugas polisi.” (Das S. , 2008)

Kasus kedua menunjukkan bahwa Gulabi Gang bukan hanya memperjuangkan hak – hak perempuan melainkan juga memperjuangkan keadilan di masyarakat. Terdapat keluhan tentang ketidakadilan pemerintah yang tidak menjual makanan dengan sewajarnya sehingga Gulabi Gang mencegat dan melakukan serangan kepada truk yang sedang menuju ke pasar. Truk tersebut sarat artian dengan “*Below Poverty Line*” yang berarti sebuah tolak ukur yang digunakan pemerintah India untuk menunjukkan kerugian ekonomi dan mengidentifikasi individu yang sedang membutuhkan bantuan dari swasta dan pemerintah. Aksi ini merupakan ajang protes Gulabi Gang kepada pemerintah dengan cara menyita gandum dan biji – bijian yang akan dijual di pasar. Polisi tidak meloloskan laporan, sehingga Gulabi Gang melakukan aksi – aksi penyerangan kepada polisi dan pihak yang terlibat. Insiden ini pada akhirnya meningkatkan kredibilitas Gulabi Gang di Attara dan sekitar wilayah tersebut. Gulabi Gang dianggap dapat memperjuangkan keadilan dan praktek ketidakadilan yang ada di masyarakat. Sehingga kredibilitas mereka sangat diperhitungkan. Kasus selanjutnya diambil dari Gulf News oleh salah satu anggota Gulabi Gang yang aktif dan sangat vokal membanggakan gerakan.

“Di wilayah dimana chauvisme tersebar, laki – laki berani memukuli istrinya di depan umum. Tidak ada seorangpun yang maju untuk membantunya bahkan sang istri takut untuk melakukan balasan. Namun saat itu Sampat menghampiri laki – laki dan memberitahu dengan tegas untuk berhenti menyiksa istrinya. Kali ini Sampat berhasil membantu perempuan tersebut dan mendesaknya untuk membela diri.”

Dalam kasus tersebut, Sampat mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Perempuan perlu untuk melakukan pembelaan diri dan melakukan aksi protes jika mengalami tindakan kekerasan. Sehingga mereka mengumpulkan perempuan dan mempersenjatai mereka dengan bambu panjang yang disebut “*lathis*”. Pelaku kekerasan akan diseret keluar rumah dan wanita lain memukulinya dengan tongkat sebelum dia berjanji untuk tidak memukuli istrinya lagi. Dengan ini, pelaku kejahatan diharapkan mendapat pelajaran dari apa yang dilakukan.